**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BADAN TAHUN 2018**

**(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta)**



Oleh:

*Ida Putri Apriliani*

*18062217*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

**2020**

**SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ida Putri Apriliani

NIM : 18062217

Fakultas/ Prodi : Ekonomi / Akuntansi

Jenis : Skripsi

Judul : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Tahun 2018

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Karya tulis berupa skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Mercu Buana Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMBY atas penulisan karya ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMBY, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagi penulis.
4. Bersedia menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMBY, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguuhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Juni 2020

Yang menyatakan,

Ida Putri Apriliani

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Badan Tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta dengan teknik *convenience sampling*. Data yang diambil berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh responden dan dianalisa dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolienaritas, uji heterosdekastisitas, dan uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dan uji t dengan bantuan program SPSS versi 20.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modenisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga diketahui nilai signifikan ≤ 0,05, yaitu 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel (5,585 > 1,985).

Sedangkan penerapan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,639. Sehingga diketahui nilai signifikan > 0,05, yaitu 0,639 > 0,05 dan nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel (0,471 < 1,985).

Kata kunci: modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

***ABSTRACT***

*This study aims to examine the effect of the modernization of the tax administration system and the application of tax sanctions to taxpayer compliance in delivering the SPT Tahunan year of 2018. The type of research used in this study is qualitative research to determine the effect of the modernization of the tax administration system and the application of tax sanctions to compulsory compliance tax case studies on taxpayers registered with KPP Pratama Yogyakarta. Respondents in this study amounted to 100 taxpayers who conduct business activities that are registered in KPP Pratama Yogyakarta with convenience sampling techniques. Data taken based on the results of a questionnaire filled out by respondents and analyzed using the normality test, multicollenarity test, heterosecondasticity test, and hypothesis testing used in this study are multiple linear regression analysis and t test with the help of SPSS version 20.*

*The results of this study indicate that the modification of the tax administration system has a significant positive effect on taxpayer compliance. This is indicated by the significance value of 0,000. So it is known that a significant value, 0.05, ie 0.000 <0.05 and the calculated t value is greater than the value of t table (5.585> 1.985).*

*While the application of tax sanctions has a negative effect on taxpayer compliance. This is indicated by the significance value of 0.639. That it is known that a significant value> 0.05, ie 0.639> 0.05 and the calculated t value is smaller than the t table value (0.471 <1.985).*

*Keywords: modernization of the tax administration system, tax sanctions, taxpayer compliance.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan menjalankan permerintahan. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti ; (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melakukan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.

Sistem Modernisasi administrasi perpajakan menurut Direktorat Jendral Pajak ditandai dengan pengorganisasian Kantor Pajak berdasarkan fungsi bukan berdasarkan jenis pajak, seperti pada Kantor Pajak Paripurna. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan pekerjaan dan kekuasaan. Selain itu, sistem administrasi pada kantor modern menggunakan teknologi informasi sehingga meningkatkan keefisienan. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, disusun SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk masing-masing pekerjaan. Modernisasi pajak juga menyediakan *e-Registration* untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, *e-SPT* untuk aplikasi laporan, sehingga menjadi paperless dan *e-Filing* untuk penyampaian SPT melalui sistem online dan *real time*.

Sistem perpajakan yang dianut Indonesia saat ini adalah system *self assessment,* dengan pengertian bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang (Diana Sari, 2013). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajaknya, dan tidak sedikit wajib pajak yang menyalahgunakan kesempatan ini untuk menyampaikan jumlah pajak yang tidak tepat, atau melaporkan pajaknya dengan terlambat. Oleh karena itu terdapat berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar wajib pajak dapat melaporkan pajaknya dengan patuh.

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir atau paradigma yang mempengaruhi kemauan pembayar pajak. Kepatuhan tersebut timbul karena berbagai faktor, baik yang berasal dari wajib pajak itu sendiri maupun dari luar wajib pajak. Faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri seperti kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, suasana individual wajib pajak yaitu tidak ada imbalan langsung dari pemerintah. Sedangkan faktor yang berasal dari luar wajib pajak seperti pendidikan, sistem perpajakan, sosialisasi, informasi tentang perpajakan, kinerja aparatur pajak, penegakan hukum. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Patut disyukuri bahwa perkembangan perpajakan Nasional kita mengarah kepada sistem yang lebih baik melalui kebijakan modernisasi perpajakan di semua lini birokrasi dan sistem teknologi informasi. Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepuasan Wajib Pajak.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ; **“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUNAN TAHUNAN BADAN TAHUN 2018: Studi Kasus pada KPP Pratama Yogyakarta.”**

## RUMUSAN MASALAH

Ditinjau dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Tahun 2018?
2. Apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Tahun 2018?
3. **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

**Pajak**

Menurut Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Mardiasmo (2018:3-), dalam bukunya yang berjudul Perpajakan. Terdapat beberapa hal yang harus diketahui Wajib Pajak sebagai berikut:

* + - * 1. Unsur atau Ciri-ciri Pajak

Ada 4 yang menggambarkan unsur atau ciri-ciri pajak sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan Undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
   1. Fungsi Pajak

Selain ciri-ciri pajak juga mempunyai fungsi yang wajib diketahui oleh Wajib Pajak. Ada dua fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran ( *Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

1. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

* 1. Pengelompokan Pajak

Dalam pengelompokan pajak terbagi menjadi tiga pengelompokan berdasarkan pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Menurut golongannya ada dua yaitu:

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkankepada orang lain.

1. Menurut sifatnya ada dua, yaitu:
2. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
4. Menurut lembaga pemungutannya

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

* 1. Sistem Pemungutan Pajak

Selain asas pemungutan pajak juga terdapat sistem pemungutan dalam melakukan pemungutan pajak sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

Wajib Pajak bersifat pasif.

Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

1. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

1. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

**Wajib Pajak**

Definisi Wajib Pajak menurut Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (2) sebagai berikut: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Erly Suandy (2011: 119), dalam bukunya yang berjudul Hukum Pajak. Terdapat Hak dan Kewajiban yang diperoleh Wajib Pajak. Hak dan Kewajiban ini diatur dalam undang-undang perpajakan yang bersifat mengikat yang dijelaskan sebagai berikut:

* + - * 1. Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

* + - * 1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus. Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem *self assessment* yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri.
        2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.

* + - * 1. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT kepada Dirjen Pajak dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo.

* + - * 1. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya. Penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga.

* + - * 1. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atau restribusi. Setelah melalui proses pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

* + - * 1. Hak mengajukan keberatan dan banding.

Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar. Jika Wajib Pajak tidak puas dengan keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

* + 1. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan sebagai berikut:

* + - * 1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.

Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

* + - * 1. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

* + - * 1. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

* + - * 1. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

* + - * 1. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksa, serta memberi keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

* + - * 1. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.
        2. Kewajiban membuat fatur pajak.

Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat fatur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Fatur Pajak yang dibuat merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

**Surat Pemberitahuan (SPT)**

Definisi SPT menurut Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (11) sebagai berikut: “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.”

Menurut Mardiasmo (2018:35-36), dalam bukunya yang berjudul Perpajakan terdapat tiga fungsi yang wajib diketahui sebagai berikut:

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan.

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
   * + - 1. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak.

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Pengeluaran.

Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

* + - * 1. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Menurut Siti Resmi (2016:39-40), dalam bukunya yang berjudul Perpajakan: Teori dan Kasus, Surat Pemberitahuan dapat dibedakan sebagai berikut:

Surat Pemberitahuan Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan, terdiri atas:

1. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26;
2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22;
3. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26;
4. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
5. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15.
6. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
7. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Pemungut.

Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan pelaporan tahunan, terdiri atas:

1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (1771- Rupiah)
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (1771- US)
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/ pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh Final dan/ atau bersifat final; dan dari penghasilan lain (1770)
4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh Final dan/ atau bersifat final (1770S);
5. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770 SS).

**Modernisasi Perpajakan di Indonesia**

Menurut Rahayu (2009:128), modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi :

1. Perubahan Struktur Organisasi

Implementasi konsep modernisasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan.

1. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.
2. Penyempurnaan manajemen SDM

**Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62).

Menurut Mardiasmo (2018:25), dalam bukunya yang berjudul Perpajakan. Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan bersifat wajib. Apabila ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan akan dikenakan sanksi, adapun sanksinya sebagai berikut:

a. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

* + - 1. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
      2. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama- lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang terutang.

**Kepatuhan wajib pajak**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, yaitu: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai.

Berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007**, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 tahun 2007 KUP pasal 28, dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a*, b, c,* dan d di atas.

**Perumusan Hipotesis**

Menurut Uno (2013) Pelayanan merupakan satu komponen yang dianggap sangat penting oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan oleh karenanya selalu diusahakan pembenahan secara menyeluruh. Kini telah ada peningkatan pelayanan, baik dari pelayanan perorangan maupun badan usaha. Bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu dalam melaporkan SPT baik itu SPT masa ataupun SPT Tahunan dapat dilaporkan secara *on-line* serta dapat membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara *on-line,* sehingga Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak lebih efektif dan efisien dalam melaporkan SPT dan membuat NPWP.

H1: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2018.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak orang atau badan yang melanggar peraturan (Harjanti Puspa Arum dan Zulaikha, 2012). Perpajakan Indonesia mengunakan sitem *self assesment system,* di mana sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal tersebut, maka diperlukan pemberian sanksi pada Wajib Pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan Wajib Pajak bila tidak membayar pajak, sehingga Wajib Pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, Sanksi Pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2018.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, (2009: 152) “Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan responden. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*causal comparative research*) dengan objek analisis yang diteliti adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian kausal komparatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan melakukan pengamatan serta menelusuri kembali fakta yang secara masuk akal sebagai faktor penyebabnya (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2009:27). Hubungan sebab akibat yang dimaksud dalam variabel penelitian yaitu pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Serta dilakukannya penelusuran kembali fakta yang secara masuk akal sebagai faktor penyebabnya.

**Variabel yang digunakan**

Variabel Dependen

Variabel dependen yaitu variable yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2010).

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penerapan sanksi perpajakan.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Rahayu, 2010:109).

Penerapan sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62).

**Metode Analisis Data**

Metode analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda.

* + - 1. Uji Kualitas Data

Dalam suatu penelitian diperoleh instrumen yang valid dan reliable. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa saja yang ingin diukur. Sedangkan reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Untuk melakukan uji kualitas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

* + - * 1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Uji validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan- pertanyaan. Apabila *Pearson Correlation* yang didapat memiliki nilai dibawah 0,05 maka data yang diperoleh adalah valid.

* + - * 1. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Suatu kuisioner dikatakan reliabel jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas apat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Repeated Measure* atau pengukuran ulang.
2. *One Shot* atau pengukuran sekali saja, pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian Cronbach Alpha (α). Suatu variable dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Pada penelian ini peneliti menggunakan pengukuran sekali saja atau One Shot.
   * + 1. Uji Asumsi Klasik
          1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable penggangu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu analis grafik dan uji *Kolmogorov- Smirnov*. Analisis grafik adalah dengan melihat grafik histogram, jika pada grafik tersebut memberikan pola distribusi yang normal (simetris/ tidak melenceng) maka menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Cara lain yaitu dengan uji *Kolmogorov- Smirnov*, jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal, sedangkan signifikansi jika nilai (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi tidak normal.

* + - * 1. Uji Multikolienaritas

Uji ini bertujuan untuk mnguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (tidak terjadi multikolinearitas) (Ghozali, 2009:91). Uji multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF).* Suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah menpunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,1 (Ghozali, 2009:92).

* + - * 1. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut Homokesdastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokesdastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian mengemput, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi Homokesdastisitas dan tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

* + - 1. Analisis Regresi Berganda

Uji penelitian ini menggunakan model analisis berganda (*Multiple Regression Analysis*). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:47). Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), sedangkan variabel bebasnya terdiri dari: modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1), dan penerapan sanksi perpajakan (X2).

Dengan persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y= α + β1X1 + β2X2

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

α= Konstanta

β1 =Koefisien regresi modernisasi sistem administrasi

perpajakan

β2 = Koefisien regresi penerapan sanksi perpajakan

X1 =Modernisasi sistem administrasi perpajakan

X1 = Penerapan sanksi perpajakan

Untuk menguji hipotesis alat yang digunakan adalah regresi berganda. Dalam penggunaan alat uji regresi berganda terdapat analisis yang digunakan, yaitu:

Uji Parsial (t-Test)

Uji Statistik t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t dilakukan dengan langkah membandingkan dari t hitung dengan t table dapat dilihat dari hasil pengolahan data bagian Coefficients (Ghozali: 2011,98). Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan Uji t pada derajat keyakinan 95% atau α= 5% .

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uji Validitas dan uji reliabilitas yang dibagikan sejumlah 30 dan dibagikan kepada mahasiswa akuntansi yang telah menempuh mata kuliah perpajakan 1 dan perpajakan 2.

Tabel 1

Uji Validitas Instrumen Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pernyataan | *Pearson Correlation* | Sig. (2-tailed) | Keterangan |
| MD1 | 0,596 | 0,000 | Valid |
| MD2 | 0,825 | 0,000 | Valid |
| MD3 | 0,693 | 0,000 | Valid |
| MD4 | 0,822 | 0,000 | Valid |
| MD5 | 0,667 | 0,000 | Valid |
| MD6 | 0,632 | 0,000 | Valid |
| MD7 | 0,590 | 0,000 | Valid |

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel 1 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel memiliki instrumen Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

Tabel 2

Uji Validitas Instrumen Sanksi Perpajakan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pernyataan | *Pearson Correlation* | Sig. (2-tailed) | Keterangan |
| SK1 | 0,899 | 0,000 | Valid |
| SK2 | 0,899 | 0,000 | Valid |
| SK3 | 0,647 | 0,000 | Valid |
| SK4 | 0,760 | 0,000 | Valid |
| SK5 | 0,899 | 0,000 | Valid |
| SK6 | 0,647 | 0,000 | Valid |
| SK7 | 0,760 | 0,000 | Valid |
| SK8 | 0,899 | 0,000 | Valid |

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel 2 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel memiliki instrumen Sanksi Perpajakan berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

Tabel 3

Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pernyataan | *Pearson Correlation* | Sig. (2-tailed) | Keterangan |
| KP1 | 0,616 | 0,000 | Valid |
| KP2 | 0,686 | 0,000 | Valid |
| KP3 | 0,629 | 0,000 | Valid |
| KP4 | 0,748 | 0,000 | Valid |
| KP5 | 0,649 | 0,000 | Valid |
| KP6 | 0,627 | 0,000 | Valid |
| KP7 | 0,708 | 0,000 | Valid |
| KP8 | 0,581 | 0,000 | Valid |

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel 3 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel memiliki subvariabel Kepatuhan Wajib Pajak berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

Tabel 4

Uji Reliabilitas Instrumen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Cronbach Alpha (α) | N of Utem | Keterangan |
| Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan | 0,808 | 7 | Reliabel |
| Sanksi Perpajakan | 0,911 | 8 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 0,797 | 8 | Reliabel |

Tabel 4 menunjukkan bahwa pertanyaan untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki koefisien alpha lebih dai 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan dalam penelitian ini yang digunakan reliabel sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat diandalkan dan dipercaya.

Uji Asumsi Klasik dibagikan kepada 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta.

Tabel 5

Uji Normalitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** | | | |
|  | | | Unstandardized Residual |
| N | | | 100 |
| Normal Parametersa,b | Mean | | 0E-7 |
| Std. Deviation | | 2,79415574 |
| Most Extreme Differences | Absolute | | ,103 |
| Positive | | ,092 |
| Negative | | -,103 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | | 1,031 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | | ,238 |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) | Sig. | | ,222c |
| 99% Confidence Interval | Lower Bound | ,211 |
| Upper Bound | ,232 |
| a. Test distribution is Normal. | | | |
| b. Calculated from data. | | | |
| c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525. | | | |

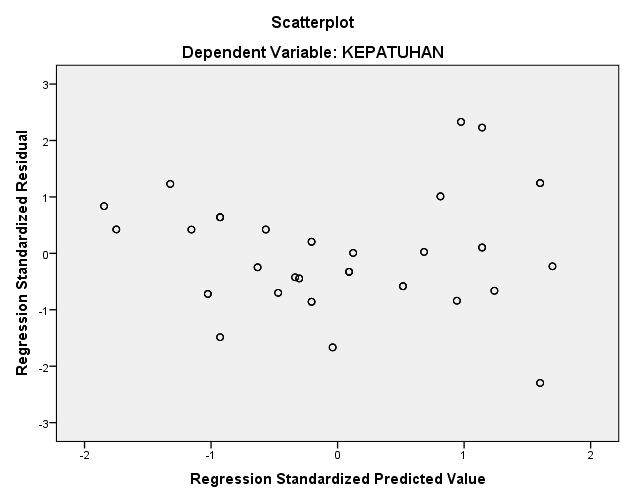
Berdasarkan tabel diatas, setelah melalui pengujian normalitas dapat diketahui hasil uji normalitas dari setiap masing-masing variabel menunjukan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > α yaitu, 0,222 > 0,05. Ini membuktikan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal sehingga uji asumsi klasik dan analisis data dapat dilanjutkan.

Tabel 6

Uji Multikoleniaritas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 12,156 | 3,330 |  | 3,651 | ,000 |  |  |
| MODERNISASI | ,613 | ,110 | ,505 | 5,585 | ,000 | ,920 | 1,086 |
| SANKSI | ,027 | ,058 | ,043 | ,471 | ,639 | ,920 | 1,086 |
| a. Dependent Variable: KEPATUHAN | | | | | | | | |

Semua variabel tidak mempunyai masalah dengan multikolinieritas. Hasil ini dapat dilihat dari nilai tolerance <1 dan nilai VIF < 10, maka dapat dikatakan bahwa semua variabel terbebas dari multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.



Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1

Berdasarkan gambar 1 di atas, dapat dilihat dan diketahui bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar 0, titik-titik tidak mengumpul di atas dan di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas, segingga model regresi yang baik dan ideal dapat diketahui.

Tabel 7

Uji Regresi Linier Berganda

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 12,156 | 3,330 |  | 3,651 | ,000 |
| MODERNISASI | ,613 | ,110 | ,505 | 5,585 | ,000 |
| SANKSI | ,027 | ,058 | ,043 | ,471 | ,639 |
| a. Dependent Variable: KEPATUHAN | | | | | | |

Dari hasil tabel 7 diatas, dapat diketahui persamaan regresi linier berganda yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

KWP = 12,156 + 0,613 MD + 0,027 SK

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

α = 12,156. konstanta menunjukkan angka 12,156 berarti jika nilai variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan bernilai 0.

β1 = 0,613. nilai koefisien variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (MD) sebesar 0,613 artinya bahwa setiap kenaikan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar satu satuan dengan asumsi bahwa variabel sanksi perpajakan bernilai 0, maka l kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,613 satuan.

β 2 = 0,027. nilai koefisien variabel Sanksi Perpajakan (SK) sebesar 0,027 artinya bahwa setiap kenaikan variabel sanksi perpajakan sebesar satu satuan dengan asumsi bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan bernilai 0, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,027 satuan.

**Pengujian Hipotesis**

Uji t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut disajikan tabel hasil uji t yaitu sebagai berikut:

Tabel 8

Uji t Parsial

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 12,156 | 3,330 |  | 3,651 | ,000 |
| MODERNISASI | ,613 | ,110 | ,505 | 5,585 | ,000 |
| SANKSI | ,027 | ,058 | ,043 | ,471 | ,639 |
| a. Dependent Variable: KEPATUHAN | | | | | | |

1. Hipotesis Pertama (H1)

Dilihat dari hasil uji statistik t Tabel 8, dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan menghasilkan nilai signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji hipotesis pertama yang ditunjukkan pada tabel 4.4. diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga diketahui nilai signifikan ≤ 0,05, yaitu 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel (5,585 > 1,985).

1. Hipotesis Kedua (H2)

Dilihat dari hasil uji statistik t Tabel 8, dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu sanksi perpajakan menghasilkan nilai signifikansi di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji hipotesis kedua yang ditunjukkan pada tabel 4.4.8 diketahui nilai signifikansi sebesar 0,639. Sehingga diketahui nilai signifikan > 0,05, yaitu 0,639 > 0,05 dan nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel (0,471 < 1,985).

1. **PENUTUP**

Kesimpulan

1. Modenisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan 2018.
2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

1. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat wajib pajak sebagai objek penelitiannya.
2. Penelitian ini hanya dilakukan selama periode satu tahun saja yaitu tahun 2018 dan waktu pengumpulan kuesioner bulan Desember 2019 hingga Januari 2020.
3. Peneliti juga mengakui bahwa bahan-bahan referensi yang digunakan dalam penelitian ini masih belum lengkap**.**

Saran

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas lingkup penelitian dengan menambah objek penelitian yang lingkupnya tidak hanya di KPP Pratama Yogyakarta saja tetapi juga pada KPP lainnya
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperbanyak sampel dan menambah variabel penelitian lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan 2018.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adi, TW. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Agustiningsih, W. 2016. “Pengaruh Penerapan *e-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Al-Bahra Bin Ladjamudin. 2013. Analisis dan Desain Sistem Informasi.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bahri Arifin, Syamsul dan Aulia Arief Nasution. 2017. “Pengaruh Kualitas

Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol 3 No 2. Hal 177-186.

Erly Suandy. (2011). *Perencanaan Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.

Fajrian Putra, Afuan. 2017. “Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak”. Jurnal Akuntansi Indonesia. Vol 6 No 1. Hal 1-12.

Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas

Sebelas Maret Press.

Jogiyanto, H.M. 2005. *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan*

*Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marcus Taufan Sofyan. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. *Skripsi* Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta.

MA Morissan, Andy Corry, dan Farid Hamid. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana

Ni Luh Supadmi. (2006). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan.http: // *ejournal.unud.ac.id* / abstrak / ok%20supadmi.pdf. Diunduh 23 Desember 2017.

Nur Indriantoro. & Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.

Nur Pratiwi, Diah. 2013. “Pengaruh Kesadaran Pajak, Otoritas Pajak Layanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey On Indocidual Taxpayer Melakukan Operasi Bisnis dan Layanan Profesional Di Jakarta)”. Fakultas Ekonomi. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Prasasti, R. 2016. “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Dikantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016”. Fakultas Ekonomi. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Priambodo, Putut. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017. Fakultas Ekonomi. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Putri Ariesta, Ristra. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang Candisari”. Jurnal Akuntansi Dewantara. Vol 1 No 2. Hal 173-187.

Sifanuri, H. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Memiliki Usaha Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto)”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto.

Siti Resmi. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba

Empat.

Umar Husein. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wahyu Adi, Titis. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Wulandari Agustiningsih. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Paja Di KPP Pratama Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Zuhair. 2018. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Mengenai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Restoran di Kota Solo dan Yogyakarta)”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.